

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dingin memberikan dampak pada dinamika perekonomian dunia sehingga mendorong negara-negara di dunia untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya termasuk dalam bidang ekonomi. Negara-negara pada saat itu berupaya memaksimalkan perekonomian negara mereka sehingga isu ekonomi banyak dibicarakan. Diplomasi ekonomi menjadi salah satu alat yang digunakan negara untuk dapat memaksimalkan perekonomian sehingga diplomasi ekonomi dipandang sebagai salah satu isu sentral. Diplomasi ekonomi mencakup berbagai aspek termasuk perdagangan internasional yang di dalamnya melibatkan kegiatan ekspor dan impor, investasi asing, dan bantuan luar negeri.¹ Subjek ekonomi dalam hal ini melibatkan masyarakat, perusahaan ekspor dan impor, perusahaan industri, dan pemerintah sebagaimana tercermin dalam neraca perdagangan.²

Kegiatan impor menjadi salah satu indikator penting untuk menunjang perdagangan internasional dan memperluas pasar perekonomian. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dalam kegiatan impor salah satunya adalah pembatasan impor.³ Pembatasan ini biasanya diterapkan untuk menyeleksi barang-

¹ Ria Anjriani Sahputri and Hendra Ibrahim, "Peran Diplomasi Ekonomi Dalam Kebijakan Untuk Meningkatkan Kerjasama Bisnis Antarnegara," *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (December 30, 2023): 2604–8, <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13329>

² Nabila Prahaski and Hendra Ibrahim, "Kebijakan Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang," *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (December 27, 2023): 2474–79, <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13292>

³ Pablo D Fajgelbaum et al., "Nber Working Paper Series the Return to Protectionism," 2019, <http://www.nber.org/papers/w25638>

barang yang masuk ke dalam suatu negara dilihat dari jumlah, lokasi pemasukan, waktu impor ataupun hal lain.⁴ Pembatasan impor juga dilakukan oleh suatu negara sebagai bentuk tindakan untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup.⁵

Salah satu contoh studi kasus terbaru mengenai pelarangan impor adalah Tiongkok yang memberlakukan kebijakan pelarangan impor produk laut milik Jepang yang masih hidup, dibekukan, didinginkan, dikeringkan atau diawetkan, garam laut, dan rumput laut.⁶ Pada Agustus 2023 melalui Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok mengumumkan larangan total impor produk laut dari Jepang termasuk semua jenis produk perikanan yang masih hidup, dibekukan, dikeringkan, didinginkan, diawetkan bahkan garam laut dan rumput laut yang sudah diolah maupun belum diolah.⁷ Kebijakan larangan impor ini disebabkan oleh keputusan Jepang yang membuang limbah nuklir mereka ke laut Pasifik.⁸

Jepang pertama kali mengumumkan keputusan membuang limbah nuklir ini pada April 2021 dan pembuangan limbah ini akan dilaksanakan pada tahun 2023. Keputusan Jepang membuang limbah nuklir tersebut dikarenakan 1.000 tangki

⁴ Marsanto Adi Nurcahyo et al., “Dampak Implementasi Kebijakan Pembatasan Impor Sepeda Pada Pola Perdagangan Internasional,” *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 7, no. 1 (2023): 2023.

⁵ Marsanto Adi Nurcahyo et al. “Dampak Implementasi Kebijakan Pembatasan Impor Sepeda Pada Pola Perdagangan Internasional”, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 7, No. 1, (2023)

⁶ Xiao Liang et al., “The Impact of Japan’s Discharge of Nuclear-Contaminated Water on Aquaculture Production, Trade, and Food Security in China and Japan,” *Sustainability* (Switzerland) 16, no. 3 (February 1, 2024), <https://doi.org/10.3390/su16031285>

⁷ Xiao Liang et al., “The Impact of Japan’s Discharge of Nuclear-Contaminated Water on Aquaculture Production, Trade, and Food Security in China and Japan,”

⁸ Yuanbo Qi, Keke You, and Shanshan Guo, “The Battle for Public Opinion of ‘Japan’s Nuclear Wastewater Sea Discharge,’” *Open Journal of Political Science* 12, no. 03 (2022): 363–72, <https://doi.org/10.4236/ojps.2022.123021>.

penyimpanan limbah nuklir yang telah penuh dan harus dibuang.⁹ Gelombang pertama pembuangan limbah nuklir dilaksanakan pada September 2023, gelombang kedua pada Oktober 2023 dan gelombang ketiga pada Maret 2024.¹⁰ Terkait kebijakan tersebut, pemerintah Jepang telah memberikan jaminan mengenai keamanan pelepasan dan penerimaan uji radiasi awal oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA).¹¹ Namun, Tiongkok tetap menolak keras kebijakan Jepang ini karena menganggap Jepang telah bertindak egois dan tidak memikirkan dampak yang akan merugikan manusia serta lingkungan.

Tiongkok mengkhawatirkan pembuangan limbah tersebut akan merusak lingkungan dan mencemari ekosistem laut. Sejak tahun 2022 Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor produk laut terbesar bagi Jepang dengan nilai ekspor sebesar 87,5 miliar yen (22,5%).¹² Hongkong menduduki peringkat ke-2 sebagai negara tujuan ekspor Jepang dengan nilai ekspor sebesar 75,5 miliar yen (19,5%), menyusul Amerika Serikat di peringkat ke-3 dengan nilai ekspor sebesar 53,8 miliar yen (13,9%) dan Taiwan dengan nilai ekspor sebesar 34,4 miliar yen (8,9%).¹³ Akibat dari larangan impor produk laut yang diberlakukan oleh Tiongkok, Jepang mengalami penurunan nilai ekspor ke Tiongkok sehingga menempatkan Tiongkok di posisi ke-3 dengan nilai ekspor sebesar 15,5% pada tahun 2023.¹⁴ Data ini

⁹ Rafael Imanuel Muliawan, Roberto Octavianus Cornelis Seba, Christian H.J de Fretes, "Respon Negara China Terhadap Kebijakan Jepang Dalam Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima" *Jurnal Media Bina* 18, No. 9, (2024)

¹⁰ Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, "Dumping Air Limbah Nuklir Fukushima Mengancam Rakyat Indonesia: TAMPAR Somasi Pemerintah Jepang", 2024

¹¹ Benchao Fu and Heran Li, "Marine Environmental Governance for Nuclear Pollution: From the Perspective of China's Response to Japan's Fukushima Nuclear Wastewater Discharge," *Marine Policy* 167 (September 1, 2024), <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106242>

¹² "FY2022 Trends in Fisheries FY2023 Fisheries Policy Summary," 2023

¹³ "FY2022 Trends in Fisheries FY2023 Fisheries Policy Summary,"

¹⁴ "FY2023 Trends in Fisheries FY2024 Fisheries Policy Summary", Fisheries Agency, 2024.

menunjukkan bahwa Tiongkok sangat berperan penting bagi aktivitas perekonomian Jepang khususnya ekspor produk laut.

Tabel 1: Ekspor produk laut Jepang tahun 2022

No.	Negara Tujuan Ekspor	Nilai Ekspor
1.	China	22,5%
2.	Hongkong	19,5%
3.	Amerika Serikat	13,9%
4.	Taiwan	8,9%
5.	Korea Selatan	6,3%
6.	Thailand	6,1%
7.	Vietnam	5,6%

Sumber: FY2023 Fisheries Policy Tahun 2023

Larangan impor yang ditetapkan oleh Tiongkok membuat Jepang harus segera bertindak untuk memperbaiki situasi ini. Larangan impor tersebut tidak hanya memberikan kerugian di bidang ekonomi, namun juga memperburuk citra dan kualitas makanan laut Jepang di mata publik Internasional. Bahkan Korea Selatan juga mengikuti langkah Tiongkok untuk menghentikan impor makanan laut milik Jepang.¹⁵

Jepang mengedepankan langkah diplomasi ekonomi untuk merespon penolakan Tiongkok tersebut. Jepang memilih jalur negosiasi dan mengadakan dialog terbuka untuk mempertahankan kepentingannya. Negosiasi dan dialog terbuka ini dilakukan di Beijing pada tanggal 18 Desember 2023. Juru Bicara

¹⁵ “4 Negara yang Hentikan Impor Makanan Laut dari Jepang, Mana Saja?”, Kompas, August 27, 2023.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menjelaskan keadaan dialog teknis putaran baru ahli Jepang dan Tiongkok terkait pembuangan limbah nuklir Fukushima ke laut.¹⁶ Selain itu, di sela-sela pertemuan Presiden Xi Jinping dengan PM Jepang Fumio Kishida di KTT APEC pada 16 November 2023 di San Fransisco kedua pemimpin negara tersebut juga menyinggung permasalahan limbah nuklir Fukushima.¹⁷

Langkah awal diplomasi ekonomi ini memberikan nilai positif bagi hubungan keduanya. Tiongkok memutuskan untuk mengambil sampel air laut Fukushima serta setuju menjadi salah satu negara yang terlibat dalam pemantauan bersama dengan IAEA untuk ikut meneliti air limbah olahan PLTN Fukushima yang dibuang ke laut.¹⁸ Dalam pers harian, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian menyebutkan bahwa sejumlah lembaga penelitian profesional dalam negeri sedang melakukan pengujian dan analisis ketat serta independen serta berupaya secepat mungkin merilis hasil uji sampel tersebut.¹⁹

Berdasarkan pemaparan peneliti tersebut, dapat dilihat konsekuensi yang harus diterima oleh Jepang terkait kebijakan membuang limbah nuklir Fukushima pada tahun 2023 sehingga Jepang harus menentukan langkah untuk menghadapi permasalahan ini. Peneliti mendapati bahwa penelitian sebelumnya terkait topik ini lebih banyak berfokus kepada dampak lingkungan, respon negara serta komunitas internasional. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai

¹⁶ “Dialog Teknis Ahli Tiongkok dan Jepang Seputar Masalah Pembuangan Air Polusi Nuklir Fukushima Digelar di Beijing” CRI, December 12, 2024.

¹⁷ “China-Jepang Sepakat Dialog soal Pembuangan Air Fukushima” IDN Times, November 19, 2023.

¹⁸ “Sampel Air Dari Lepas Pantai Fukushima Tiba Di China Untuk Pemeriksaan,” Antara, February 13, 2025.

¹⁹ “Sampel Air Dari Lepas Pantai Fukushima Tiba Di China Untuk Pemeriksaan.”

dampak lingkungan, respon negara dan komunitas internasional, namun kajian mengenai strategi diplomasi ekonomi Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor ini masih terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Keputusan Jepang untuk membuang limbah nuklir Fukushima ke Laut Pasifik memicu kritik internasional, termasuk dari Tiongkok yang merespons dengan memberlakukan larangan impor terhadap produk laut Jepang. Larangan ini memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Jepang mengingat Tiongkok merupakan pasar utama ekspor produk lautnya. Meskipun Jepang telah menyebutkan bahwa pelepasan limbah nuklir tersebut aman namun pernyataan ini belum mampu meyakinkan Tiongkok sepenuhnya. Oleh karena itu, Jepang perlu menetapkan strategi diplomasi ekonomi untuk mengatasi dampak kebijakan ini dan memulihkan hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang dalam menghadapi larangan impor produk laut oleh Tiongkok. Kajian ini akan mengeksplorasi strategi yang diambil oleh Jepang untuk dapat kembali memasuki akses pasar Tiongkok serta memitigasi dampak ekonomi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi diplomasi ekonomi

yang dilakukan oleh Jepang terhadap kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang untuk menyelesaikan permasalahan larangan impor produk laut oleh Tiongkok akibat pembuangan limbah nuklir Fukushima yang dilakukan oleh Jepang tahun 2023 menggunakan empat strategi diplomasi ekonomi menurut Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan penulisan penelitian ini maka diharapkan pembaca memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, penelitian ini berguna untuk menambah referensi bagi mahasiswa hubungan internasional dalam ruang lingkup kajian ekonomi politik global khususnya isu terkait diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang untuk menyelesaikan permasalahan larangan impor produk laut oleh Tiongkok karena kebijakan Jepang membuang limbah nuklir Fukushima tahun 2023.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi para pengambil kebijakan, akademisi, maupun praktisi hubungan internasional khusus dalam kajian ekonomi politik global dalam merancang strategi diplomasi ekonomi yang efektif ketika menghadapi hambatan non-tarif dari negara mitra dagang.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji oleh peneliti dan dapat digunakan untuk memperdalam analisis terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Berikut beberapa rujukan yang digunakan oleh peneliti antara lain:

Referensi pertama yang digunakan oleh peneliti dengan judul Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Meningkatkan Ekspor Produk Tekstil ke Australia Melalui IA-CEPA Tahun 2020-2023 yang ditulis oleh Syifa Humaira Amani, Syahrul Salam.²⁰ Artikel ini membahas mengenai hubungan antara Indonesia dan Australia yang mewujudkan kerjasamanya melalui *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) sebagai kemitraan yang menggabungkan kedua negara. Australia sebagai salah satu importir pakaian jadi terkemuka dan secara historis telah mengembangkan ketergantungan pada China untuk impor utama. Sedangkan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menjadi salah satu manufaktur yang menunjang perekonomian Indonesia. Meskipun Indonesia dan Australia telah memperkuat hubungan keduanya melalui IA-CEPA namun setelah 3 tahun IA-CEPA diberlakukan produk tekstil Indonesia masih mengalami tantangan untuk masuk ke pasar Australia. Oleh sebab itu, Indonesia berupaya melakukan optimalisasi ekspor tekstil ke Australia sebagai bentuk pemanfaatan IA-CEPA.

²⁰ Syifa Humaira Amani and Syahrul Salam, "Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Produk Tekstil Ke Australia Melalui IA-CEPA Tahun 2020-2023," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 13, no. 1 (May 1, 2024): 63, <https://doi.org/10.25077/ajis.13.1.63-79.2024>

Dalam menangani tantangan tersebut artikel ini menggunakan strategi diplomasi untuk meningkatkan ekspor tekstil Indonesia ke Australia yang dianalisis menggunakan 4 tahapan diplomasi ekonomi menurut Kishan S. Rana yaitu *economic salesmanship, networking, image building, dan regulation management*. Artikel berguna bagi peneliti untuk melihat bagaimana sebuah negara menjalankan diplomasi ekonomi sebagai salah satu alat untuk mencapai kepentingan nasional. Selain itu, artikel ini juga memberikan wawasan baru bagi peneliti untuk melihat strategi-strategi diplomasi ekonomi yang berbeda dengan strategi diplomasi ekonomi menurut Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock.

Referensi kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Kemala Aulia Rahmah, Suwarti Sari dan Jusmalia Oktaviani dengan judul *Diplomasi Ekonomi Tiongkok ke Arab Saudi Dalam Sektor Energi Tahun 2019-2023*.²¹ Artikel ini membahas mengenai Tiongkok dan Arab Saudi yang menandatangani MoU Kerjasama Minyak Strategis yang dengan tujuan mempermudah perdagangan, investasi, pertukaran informasi dan teknologi lainnya pada sektor energi. Pengesahan MoU ini didasari karena ketergantungan Tiongkok terhadap energi minyak yang melonjak pesat karena pertumbuhan populasi dan Arab Saudi sebagai produsen minyak dunia melihat Tiongkok sebagai pasar strategisnya.

Artikel ini menggunakan 4 tahapan diplomasi oleh Kishan S. Rana untuk menganalisis diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok untuk mencapai keamanan energinya hingga berhasil menjadikan Arab Saudi sebagai mitra strategis

²¹ Kemala Aulia Rahmah, Suwarti Sari, Jusmalia Iktaviani, "Diplomasi Ekonomi Tiongkok ke Arab Saudi Dalam Sektor Energi Tahun 2019-2023". *Global Insight Journal* 1, No. 1, 2024, <https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2456>

Tiongkok guna menjaga keamanan energi negaranya. Pada artikel ini juga disimpulkan bahwa diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok berhasil memberikan pengaruh positif bagi diversifikasi kerjasama bagi Tiongkok pada sektor lain. Artikel ini memberikan pandangan baru bagi peneliti dalam mengimplementasikan konsep diplomasi ekonomi guna menganalisis mengenai strategi yang dilakukan oleh Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok.

Referensi ketiga yang digunakan oleh peneliti adalah artikel yang ditulis oleh Xiao Liang, Shilong Yang, Zhichao Lou dan Abdelrahman Ali dengan judul *The Impact of Japan's Discharge of Nuclear-Contaminated Water on Aquaculture Production, Trade, and Food Security in Tiongkok and Japan*.²² Tindakan pembuangan limbah nuklir yang diumumkan oleh Jepang pada tahun 2021 menimbulkan permasalahan baru bagi negara-negara lain termasuk Tiongkok yang merupakan tetangga di kawasan Asia Timur. Keputusan pembuangan limbah nuklir ini dipilih oleh Jepang karena penuhnya tangki-tangki penampung limbah nuklir sehingga diperlukan tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tiongkok menjadi salah satu negara yang menentang keras kebijakan pembuangan limbah ini sehingga melalui Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan impor produk laut dari Jepang karena Tiongkok khawatir dengan kontaminasi limbah nuklir terhadap produk laut milik Jepang. Artikel ini memaparkan bahwa kebijakan Jepang membuang limbah nuklir ke laut tidak hanya berdampak kerugian terhadap ekonomi makro sosialnya

²² Xiao Liang, Shilong Yang, Zhichao Lou, and Abdelrahman Ali. "The Impact of Japan's Discharge of Nuclear-Contaminated Water on Aquaculture Production, Trade, and Food Security in China and Japan." *Sustainability (Switzerland)* 16, no. 3 (February 1, 2024). <https://doi.org/10.3390/su16031285>.

namun juga akan mempengaruhi aspek sosial Jepang. Manfaat artikel ini terhadap penelitian adalah untuk mengetahui dampak yang diterima Jepang dari kebijakan membuang limbah nuklir ke laut salah satunya adalah hambatan perdagangan produk laut dan penurunan nilai ekspor Jepang.

Referensi keempat yang digunakan oleh peneliti adalah artikel yang ditulis oleh Rafael Imanuel Muliawan, Roberto Octavianus Cornelis Seba, dan Christian H.J de Fretes yang berjudul Respon Negara China Terhadap Kebijakan Jepang Dalam Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima.²³ Dalam artikel ini membahas mengenai respon Tiongkok yang menentang kebijakan pembuangan limbah nuklir Fukushima oleh Jepang karena Tiongkok sangat mengkhawatirkan limbah-limbah yang dibuang ke laut tersebut beresiko besar merusak ekosistem laut dan memberikan dampak buruk kepada kesehatan manusia. Tiongkok mendesak Jepang untuk menghentikan kebijakan pembuangan limbah nuklir karena Tiongkok beranggapan bahwa Jepang masih belum dapat membuktikan bahwa air limbah yang dibuang ke Laut Pasifik telah diolah sehingga benar-benar aman.

Meskipun Jepang telah mengumumkan bahwa limbah nuklir yang dibuang ke laut tersebut dianggap aman karena memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) namun Tiongkok masih menolak produk laut dari Jepang. Merespon kebijakan pembuangan limbah nuklir Jepang di sisi ekonomi, Tiongkok melarang impor produk laut dari Jepang demi melindungi kesehatan konsumen negaranya. Tiongkok juga tidak ingin Jepang memperlakukan laut tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Artikel

²³ Rafael Imanuel Muliawan, Roberto Octavianus Cornelis Seba, Christian H.J de Fretes, "Respon Negara China Terhadap Kebijakan Jepang Dalam Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima" Jurnal Media Bina 18, No. 9, (2024)

ini lebih berfokus pada respon Tiongkok terhadap kebijakan pembuangan limbah nuklir Jepang sedangkan penelitian ini akan berfokus kepada diplomasi ekonomi Jepang menghadapi respon Tiongkok melarang impor produk laut milik Jepang.

Referensi kelima dengan judul *The Battle for Public Opinion of “Japan’s Nuclear Wastewater Sea Discharge* yang ditulis oleh Yuanbo Qi, Keke You, Shanshan Guo.²⁴ Artikel ini menjelaskan reaksi publik global setelah Jepang mengumumkan kebijakan membuang limbah nuklir ke laut. Kebijakan Tiongkok menutup keran impor dari Jepang menjadi salah satu respon tegas Tiongkok menentang kebijakan Jepang. Korea Selatan juga merupakan salah satu negara yang berada di satu kawasan yang sama dengan Jepang yang turut serta mengikuti langkah Tiongkok melarang impor produk laut dari Jepang. Greenpeace bahkan menentang kebijakan Jepang ini karena pembuangan limbah nuklir ke laut membahayakan ekosistem laut.

Tiongkok juga meminta organisasi internasional seperti *United Nations (UN)*, *World Health Organization (WHO)*, dan *International Atomic Energy Agency (IAEA)* untuk mengembangkan standar ilmiah dan standar mengenai bahaya air limbah nuklir. Namun disisi lain, pemerintah Amerika Serikat justru memberikan dukungan terhadap kebijakan Jepang meskipun masyarakat Amerika sendiri menentang kebijakan tersebut. Peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat perdebatan opini publik terhadap kebijakan pembuangan limbah nuklir oleh Jepang karena adanya perbedaan pandangan mengenai keamanan limbah nuklir tersebut.

²⁴ Qi, You, and Guo, “The Battle for Public Opinion of ‘Japan’s Nuclear Wastewater Sea Discharge.’”, *Open Journal of Political Science* 12. 2022. <https://www.scirp.org/journal/ojps>.

Artikel ini akan digunakan sebagai referensi untuk melihat respon publik terkhususnya penolakan Tiongkok mengenai kebijakan Jepang tersebut.

1.7 Kerangka Konseptual

Penggunaan teori maupun konsep dalam sebuah penelitian sangat diperlukan sebagai alat yang digunakan untuk membantu peneliti menganalisis permasalahan yang ada serta membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dipaparkan.

1.7.1 Diplomasi Ekonomi

Geoff R. Berridge dan Alan James mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi seperti imbalan /sanksi, pemanfaatan sumber daya ekonomi atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵ Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock memaparkan bahwa diplomasi ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas sehingga perlu dipahami unsur-unsur terkait yaitu tujuan aktor dan alat yang digunakan.²⁶ Dalam pemahaman yang lebih luas, Okano Heijmans menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi melibatkan penggunaan alat-alat ekonomi untuk mencapai stabilitas politik negara, serta penggunaan alat-alat politik dalam negosiasi internasional dengan tujuan meningkatkan perekonomian suatu negara.²⁷ Dalam implementasinya, diplomasi ekonomi terdiri dari berbagai aktor yaitu aktor negara/pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta dan

²⁵Asep Setiawanet al., “Seminar Nasional Penelitian Website: [Http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnaslit](http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnaslit) E-ISSN: 2745-6080 Analisis Diplomasi Ekonomi Indonesia Ke Asia Tengah,” n.d., <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit///>

²⁶ Yeni Herliana Yoshida and Muhammad Farhan Kriswandwitanaya, “,”Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Memajukan Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Kepemimpinan Indonesia Dalam Forum G-20 Tahun 2022” *Global Mind* 5, No. 1, 2023, 1-12

²⁷ Yeni Herliana Yoshida, Muhammad Farhan Kriswandwitanaya,”Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Memajukan Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Kepemimpinan Indonesia Dalam Forum G-20 Tahun 2022”

pemangku kepentingan lainnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara masih menjadi aktor tumpuan utama dalam menjalankan diplomasi.²⁸

Kishan S. Rana mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh negara untuk mengelola hubungan luar negeri dengan tujuan memaksimalkan keuntungan negara di segala aspek termasuk aspek perdagangan, investasi, dan aktivitas ekonomi lain.²⁹ Diplomasi ekonomi tersebut terjadi dalam hubungan bilateral, multilateral atau regional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Layanan diplomatik dan komersial serta aktor non-negara lainnya yang membuat kemitraan ekonomi bersifat dinamis.³⁰ Dalam bukunya yang berjudul *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations* tahun 2003, Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock menyebutkan terdapat ada empat strategi yang akan dilakukan oleh negara dalam menjalankan diplomasi ekonomi. Keempat strategi tersebut antara lain:³¹

1. *Involving Ministers*

Strategi pertama adalah keterlibatan yang lebih besar dari para menteri sehingga meningkatkan kepentingan politik. Keterlibatan para menteri tidak hanya pada pertemuan-pertemuan di forum internasional namun juga memberikan dampak terhadap proses pengambilan keputusan dalam negeri. Lebih banyaknya

²⁸ Al Bahits Annet Shanti Darmastuti Andi Kurniawan, "Aplikasi Model Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Brasil Dalam Meningkatkan Ekspor Minyak Nabati Periode 2017-2021," *Indonesian Perspective*, vol. 7, 2022.

²⁹ Natsha Nabilla, "Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Neraca Perdagangan Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Sosial Politik* 7, no. 2 (November 30, 2021): 227–39, <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.15925>

³⁰ Kishan S Rana, "Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries," (2007), 1-22

³¹ Nicholas Bayne, Stephen Woolcock, "The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations", 2003

peran menteri-menteri ini akan meningkatkan akuntabilitas dan respon alami terhadap penetrasi isu-isu internasional yang lebih besar kepada keadaan ekonomi dalam negeri.

2. *Bringing in non-state actors*

Dalam tahapan strategi ini, negara akan melibatkan pihak-pihak diluar pemerintah pusat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun diplomasi ekonomi menjadi salah satu alat untuk mencapai kepentingan negara, namun aktor-aktor yang terlibat dalam proses ini tidak hanya aktor *state*. Keterlibatan pihak-pihak swasta juga memengaruhi kebijakan pemerintah melalui dua mekanisme utama yaitu, secara langsung melalui aktivitas di tingkat perusahaan atau asosiasi dan secara tidak langsung melalui keputusan dan dinamika pasar. Pihak swasta ini tidak bisa dilepaskan dari proses diplomasi ekonomi mengingat pihak swasta seperti perusahaan yang bergerak di bidang dagang berorientasi pada keuntungan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan efektivitas diplomasi ekonomi penting Bayne dan Woolcock melihat perlunya kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta yang memiliki kepentingan serupa. Mengingat kebijakan pemerintah secara tidak langsung memengaruhi dinamika operasional perusahaan.

3. *Greater Transparency*

Dalam strategi ini negara mendorong transparansi yang lebih luas kepada masyarakat internasional untuk informasi yang lebih jelas dan publisitas yang lebih banyak. Pemerintah dalam hal ini berupaya untuk memberikan informasi agar dapat menanggapi tekanan dari publik dan dapat lebih baik menjelaskan kegiatan mereka. Informasi yang lebih transparan dan diketahui oleh banyak orang akan memberikan menjawab atas kecemasan masyarakat tentang sebuah isu.

4. *Using Institutions*

Dalam strategi ini pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mendukung proses diplomasi ekonomi mereka. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock menyebutkan bahwa diplomasi ekonomi modern tidak hanya melibatkan interaksi antarnegara di tingkat bilateral, tetapi juga sangat dipengaruhi dan difasilitasi oleh berbagai jenis institusi. Melibatkan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi diharapkan akan memberikan justifikasi dari kebijakan domestik pemerintah sehingga lembaga yang tersebut juga akan memperluas jangkauan informasi kepada komunitas internasional.

Bayne dan Woolcock mengelompokkan dua jenis institusi yang terlibat dalam proses diplomasi ekonomi yaitu institusi domestik dan institusi internasional. Institusi domestik seperti keterlibatan Departemen Kementerian yang bersangkutan dengan kepentingan negara. Institusi domestik ini berperan membantu negara untuk merumuskan sebuah kebijakan. Sedangkan institusi internasional melibatkan institusi seperti Uni Eropa, *World Bank*, *World Trade Organization* (WTO), dan lembaga internasional sesuai dengan keahliannya.

Berdasarkan penjelasan kerangka konsep di atas, peneliti akan menggunakan empat strategi dalam diplomasi ekonomi menurut Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock untuk menganalisis strategi diplomasi ekonomi Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok. Peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan Jepang dalam menghadapi larangan impor produk laut oleh Tiongkok.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis isu mengenai diplomasi ekonomi Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok. Metode kualitatif adalah sebuah rangkaian penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif sehingga diperoleh data dari hasil pengamatan.³² Penelitian kualitatif berperan penting dalam menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai masalah sosial dan manusia. Pendekatan ini mencari dan menggali fakta, informasi, makna, persepsi serta pengalaman yang ada di balik suatu fenomena.³³ Karakteristik penelitian kualitatif adalah dengan mendeskripsikan fakta atau suatu kejadian yang sebenarnya.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dimana peneliti akan mendeskripsikan fenomena dari topik penelitian dimulai dari hal khusus ke hal yang lebih spesifik. Jenis penelitian deskriptif ini dipilih untuk menjawab pertanyaan mengenai diplomasi ekonomi Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok.

1.8.2 Batas Penelitian

Diperlukan batasan yang jelas dalam suatu penelitian agar dapat memudahkan pemahaman maksud dan tujuan dilakukannya suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti membatasi penelitian pada tahun 2023 sampai Juni

³² Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif : Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, April 2020) Hal. 19///

³³ Eko Murdiyanto

2025. Tahun 2023 merupakan awal mulai dikeluarkannya larangan impor produk laut Jepang ke Tiongkok. Sedangkan tahun 2025 terkait kesepakatan kedua negara menyelesaikan konflik antar kedua negara.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis dapat dipahami sebagai objek yang dibahas dan dianalisis dan melakukan suatu penelitian.³⁴ Kemudian juga terdapat unit eksplanasi yang mempengaruhi atau berdampak kepada tindakan atau perilaku dari unit analisis.³⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian dalam unit analisis adalah diplomasi ekonomi Jepang. Kemudian yang menjadi unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok.

Level analisis didefinisikan didalamnya individu, negara atau sistem yang menjadi pembahasan utama dalam suatu teori.³⁶ Level analisis ini akan membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dimulai dengan mengkaji bagaimana interaksi antar aktor atau juga disebut sebagai sistem internasional kemudian dianalisis secara terperinci.³⁷ Penelitian ini berfokus pada level negara karena peneliti menganalisis terkait diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok.

³⁴ Mohtar Mas'ud, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990). 39-40

³⁵ Mohtar Mas'ud, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990)

³⁶ Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional," n.d., http://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509z_G.pdf.

³⁷ Mohtar Mas'ud, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990). 35-286.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder didapatkan melalui sumber lain seperti buku, jurnal, berita, dan situs resmi. Salah satu buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock dengan judul *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations* tahun 2003 edisi pertama. Beberapa jurnal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu artikel yang ditulis oleh Xiao Liang, Shilong Yang, Zhichao Lou dan Abdelrahman Ali dengan judul *The Impact of Japan's Discharge of Nuclear-Contaminated Water on Aquaculture Production, Trade, and Food Security in Tiongkok and Japan* dan jurnal dengan judul Respon Negara China Terhadap Kebijakan Jepang Dalam Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima yang ditulis oleh Rafael Imanuel Muliawan, Roberto Octovianus Cornelis Seba, dan Christian H.J de Fretes. Data yang diperoleh akan diolah untuk menemukan jawaban terhadap masalah penelitian. Penelitian ini juga memperoleh informasi dari beberapa laman resmi seperti Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA) yang diakses melalui <https://www.mofa.go.jp> untuk mengakses data ekspor Jepang.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis isu yang diteliti, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga tahapan untuk menganalisis data.³⁸ Pertama, kondensasi data adalah suatu bentuk analisis yang merapikan, menyortir, memusatkan, menyeleksi dan mengatur data

³⁸ Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, and Sri Jumiyati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d., www.globaleksekutifteknologi.co.id

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.³⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menyusun beberapa data sekunder yang memaparkan bagaimana penolakan Tiongkok terhadap kebijakan limbah nuklir Jepang serta dinamika hubungan ekonomi keduanya terutama dalam ekspor-impor produk laut. Kedua, tampilan data merupakan proses dimana peneliti memproses informasi yang telah dikumpulkan agar memudahkan peneliti untuk memahami dan merencanakan langkah selanjutnya.⁴⁰ Ketiga, kesimpulan merupakan penarikan simpulan dari hasil analisis berdasarkan bukti yang diperoleh selama melakukan penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini akan disimpulkan mengenai strategi diplomasi ekonomi Jepang dalam menghadapi larangan impor produk laut oleh Tiongkok.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan substansi dari penelitian dengan memaparkan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, konseptual yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Diplomasi Ekonomi dan Hubungan Dagang Jepang-Tiongkok

Bab ini menjelaskan tentang diplomasi ekonomi Jepang sebagai salah satu alat untuk mencapai kepentingan negara. Bab ini juga akan menjelaskan dinamika

³⁹ Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, and Sri Jumiyati, Metodologi Penelitian Kualitatif.

⁴⁰ Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan".| *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran* 3, No.2, 2022, <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjppp.v3i2.11758>.

⁴¹ Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan"

hubungan bilateral antara Jepang dan Tiongkok. Lebih spesifik bab ini akan memaparkan hubungan dagang antara Jepang dan Tiongkok dalam sektor produk laut. Selanjutnya, akan dijelaskan juga bagaimana potensi produk laut Jepang sebagai salah satu komoditas unggulan negara tersebut.

Bab III Kebijakan Larangan Impor Produk Laut Oleh Tiongkok

Bab ini akan menjelaskan mengenai pembuangan limbah nuklir Fukushima Jepang yang menjadi latar belakang munculnya kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok pada tahun 2023. Bab ini berisi penjelasan mengenai kebijakan yang dipilih oleh Tiongkok yaitu pelarangan impor produk laut milik Jepang serta alasan Tiongkok memilih kebijakan ini. Bab ini juga akan memaparkan perkembangan kesepakatan antara Jepang dan Tiongkok mengenai kebijakan larangan impor tersebut.

Bab IV Strategi Diplomasi Ekonomi Jepang dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Impor Produk Laut oleh Tiongkok

Bab ini menyajikan analisis dari strategi diplomasi ekonomi Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok yang dianalisis melalui konsep diplomasi ekonomi oleh Nicholas Bayne dan Stephen Woolcok dengan 4 indikator di dalamnya.

Bab V Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terkait strategi diplomasi ekonomi Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok.